



Lagi, Riau Raih Opini WTP

PEMPROV Riau menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (9/6) dalam paripurna DPRD Riau. Namun ada sembilan pelanggaran yang menjadi catatan untuk dapat diselesaikan minimal dua bulan ke depan.

Hasil opini BPK diserahkan auditor utama keuangan negara BPK RI Dr Bambang Pamungkas

AK MBA, didampingi Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau Drs Widiyatmantoro, kepada Ketua DPRD Riau Drs HM Johar Firdaus MSI dan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) H Arsyadjuliandi Rachman di Gedung DPRD Riau. Hasil itu menjadikan Riau mampu mempertahankan opini WTP tiga tahun berturut-turut.

Wagubri usai paripurna mengucapkan terimakasih kepada BPK yang sudah memberikan opini sesuai LKPD Provinsi Riau 2013. Namun ia tidak menampik

ada beberapa hal yang harus dijawab berdasarkan catatan-catatan dari opini WTP-DPP tersebut. "Tugas kita sesuai Undang-undang harus menjawab beberapa item yang menjadi catatan-catatan, perbaikan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan tersebut," katanya.

Bambang Pamungkas mengatakan pemeriksaan yang dilakukan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sehingga apa-apa yang menjadi catatan sesuai peraturan perundang-undangan akan

diberikan waktu perbaikan.

"Paling lama 60 hari ke depan sudah dapat dijawab apa yang menjadi temuan dari hasil pemeriksaan tersebut. Secara global ada sembilan item yang perlu diberikan jawaban. Tampaknya Pemprov Riau sudah menyiapkan *action plan*," kata auditor utama keuangan negara BPK RI tersebut.

Sebelumnya, Pemprov Riau untuk LKPD 2011 juga menerima opini WTP dari BPK RI. Lalu dilanjutkan pada LKPD 2012 yang diterima pada 2013 yang

merupakan akhir masa jabatan Gubernur HM Rusli Zainal. Kembali mempertahankan untuk ketiga kalinya opini serupa pada tahun ini atas pemeriksaan LKPD 2013.

Sementara Ketua DPRD Provinsi Riau Drs Johar Firdaus MSI mengatakan, pemerintah harus mempertanggungjawabkan terlebih dahulu pengelolaan keuangan sebelumnya baru melangkah pada agenda berikutnya. "Tentunya apa yang menjadi catatan harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu," kata Johar. (adv/a/c)



HUMAS PEMPROV RIAU

TERIMA AUDIT: Wakil Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman menerima hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Riau 2013 dari Auditor Utama Keuangan Negara BPK RI Dr Bambang Pamungkas AK MBA di Gedung DPRD Riau, Senin (9/6/2014).